

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN (SSK) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANGUNTAPAN

IMPLEMENTATION OF POPULATION ALERT SCHOOL IN SENIOR HIGH SCHOOL 1 BANGUNTAPAN

Oleh: Denada Resta Wahyu Khusmiati, Universitas Negeri Yogyakarta
denadaresta.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tahap implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA N 1 Banguntapan, implementasi dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 tahap implementasi yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Dalam proses implementasi komunikasi terjalin dua arah, sumber daya manusia kompeten, koordinasi lancar dan struktur birokrasi efisien. Faktor pendukung yaitu dukungan lebih dari guru dan fasilitas yang bagus. Faktor Penghambat yaitu terbatasnya anggaran sekolah, mahalnya biaya pengadaan fasilitas, serta kendala dalam mengintegrasikan materi kependudukan ke materi pelajaran.

Kata Kunci : Sekolah Siaga Kependudukan, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Formal

Abstract

This research aims to describe the stages of implementation of the Population Aware School Policy at SMA N 1 Banguntapan, focusing on communication, resources, disposition, bureaucratic structure, as well as supporting and inhibiting factors. The study employs a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis follows the Miles, Huberman, and Saldana model involving data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Data validity is ensured through source triangulation, technique triangulation, and time triangulation. The research findings indicate three implementation stages: interpretation, organization, and application. The communication process involves two-way communication, competent human resources, smooth coordination, and efficient bureaucratic structure. Supporting factors include strong teacher support and good facilities. Inhibiting factors include limited school budget, high cost of facility procurement, and challenges in integrating population-related materials into the curriculum.

Keywords: Population Aware School, Policy Implementation, Formal Education

PENDAHULUAN

Data terakhir yang dirilis oleh Worldometers pada Desember 2020, Indonesia menduduki peringkat keempat negara populasi terbanyak di dunia dengan jumlah populasi penduduk 273.523,615 jiwa. Kondisi ini menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki berbagai

macam permasalahan kependudukan. Diantaranya ledakan jumlah penduduk, tingginya angka pernikahan dini, kenaikan kasus perceraian, tingginya kasus narkoba serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan ledakan penduduk ini juga menyebabkan sebaran jumlah

penduduk menjadi tidak merata. Pulau Jawa menduduki posisi teratas dengan persentase penduduk paling banyak yakni 55,94 persen padahal luas wilayahnya hanya 7% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Berdasarkan informasi dari tirto.id, tingkat kepadatan Pulau Jawa kisaran 1.171 jiwa/km² itu lebih buruk dari rata-rata kepadatan nasional yang berada pada angka 141 jiwa/km². Ini artinya tingkat kepadatan penduduk di pulau Jawa 8,3 kali lipat lebih besar dari rata-rata nasional. Kondisi ini menyebabkan pemerataan pembangunan tidak merata, karena hanya akan terfokus di pulau Jawa saja.

Permasalahan kependudukan berikutnya yang terus meningkat adalah perihal kasus perceraian. Minimnya pengetahuan perencanaan keluarga dan kesiapan dalam menikah menjadi salah satu faktor tingginya tingkat perceraian. Berdasarkan data BPS dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2015 sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup), jumlahnya sekitar 3,9 juta dari keseluruhan 67,2 juta rumah tangga. Pada tahun 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan. Selain itu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja semakin meningkat, dimana angka peningkatan sebesar 24-28 % remaja yang menggunakan narkotika, sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Hal ini juga mengakibatkan rawan putus sekolah pada anak-anak. Seperti yang dilansir pada stastistik.data.kemendikbud.go.id di

wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan angka drop out di tingkat SMA pada tahun ajaran 2017/2018 total angka drop out sebanyak 143 siswa, sedangkan di tahun 2018/2019 total angka drop out meningkat menjadi 294 siswa. Faktor lain yang disebabkan oleh permasalahan kependudukan yaitu pernikahan dini pada usia remaja.

Pada tahun 2030-2040 mendatang, Indonesia akan memasuki era bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif yaitu penduduk dengan rentang usia 15-64 tahun, akan lebih banyak dibandingkan penduduk usia nonproduktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Bonus demografi akan menjadi fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan (Asrie, 2020).

Edukasi mengenai kependudukan kepada masyarakat wilayah luas dapat dimulai melalui pendidikan di sekolah. BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi atau pengetahuan mengenai kependudukan agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dan digunakan serta permasalahan-permasalahan yang harus dihindari dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya melalui Sekolah Siaga Kependudukan (bkkbn.go.id, 2019). Output dari program SSK yaitu pemahaman tentang kependudukan, baik kuantitas, kualitas persebaran yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung pentingnya kesehatan reproduksi dan pembentukan keluarga yang berkualitas serta diharapkan dapat meminimalisir perkawinan usia anak (BKKBN, 2019).

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang telah menyelenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan dari jenjang SD hingga SMA. Program ini mulai diselenggarakan di DIY pada tahun 2019. Sekolah-sekolah formal yang telah menyelenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan tersebar di lima kabupaten Provinsi DIY. Dengan adanya sekolah siaga kependudukan, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelajar, untuk memikirkan masa depan mereka (P3AP2KB, 2020).

Salah satu sekolah formal di Bantul yang telah menyelenggarakan Sekolah Siaga Kependudukan adalah SMA Negeri 1 Banguntapan. Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, latar belakang dilaksanakannya sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Banguntapan salah satunya karena letak sekolah yang berada di kawasan yang rawan kenakalan remaja dan tingkat nikah dini yang cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan terjadi pergaulan bebas di kalangan remaja yang dapat menyebabkan pernikahan usia dini dan kenakalan remaja yang lainnya yang berpengaruh panjang pada kualitas kependudukan. Melalui tindakan preventif berupa penanaman pengetahuan kependudukan maka diharapkan hal tersebut tidak terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2020:9). Pada penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan suatu kejadian yang sesuai dengan apa yang dialami secara langsung oleh subjek penelitian dan menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata mengenai pelaksanaan kebijakan SSK di SMA Negeri 1 Banguntapan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan implementasi dari Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Negeri 1 Banguntapan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan. Yang beralamatkan di Dusun Ngentak, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 Februari-30 April 2024.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Pembina SSK, Guru, dan siswa. Subjek penelitian tersebut diambil menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi dalam penelitian ini mengumpulkan data

mengenai pelaksanaan kebijakan SSK di SMA Negeri 1 Banguntapan

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020:114). Pada penelitian ini, peneliti dalam memperoleh informasi melalui wawancara dengan Kepala Sekolah, Pembina SSK SSK, Guru, dan Peserta Didik SMA Negeri 1 Banguntapan.

3. Dokumentasi

Nana Syaodih (2015:221) mendefinisikan studi dokumentasi sebagai suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendukung kelengkapan data dari hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi kebijakan SSK di SMA Negeri 1 Banguntapan

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Model Interaktif Miles and Hubberman yang dikutip dalam Sugiyono (2020:143) yaitu pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

Uji Keabsahan

Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan yang dibentuk oleh BKKBN sebagai sikap preventif dan persuasif pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia. Sehingga pelaksanaan SSK di SMA N 1 Banguntapan merupakan bentuk dukungan dan kontribusi sekolah dalam rangka membantu pemerintah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik mengenai pendidikan kependudukan.

Pelaksanaan kebijakan SSK di SMA N 1 Banguntapan melalui beberapa tahapan yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Implementasi kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan dipengaruhi oleh empat faktor menurut George Edward III dalam (Widodo, 2010:96) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Tahap Implementasi Kebijakan SSK di SMA N 1 Banguntapan.

1. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi kebijakan dilakukan agar kebijakan yang akan dilaksanakan memiliki rencana yang jelas dan terarah dengan tepat sehingga dapat diterima serta dipahami oleh implementor dan kelompok sasaran. Di SMA N 1 Banguntapan tahap interpretasi dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan perumusan sekolah siaga kependudukan yang dilakukan dengan rapat dewan guru pembahasan teknis pelaksanaan SSK di SMA N 1 Banguntapan dan pembentukan tim SSK. serta kegiatan sosialisasi secara langsung kepada warga sekolah dan orangtua siswa. Sosialisasi SSK diterima

dengan baik oleh warga sekolah dan orang tua siswa.

2. Tahap Pengorganisasian

Kegiatan dalam tahap pengorganisasian ini berfokus pada penetapan sumber daya manusia yang akan menjadi pelaksana dan proses pengaturan kegiatan berupa anggaran dan fasilitas. Pelaksana kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Banguntapan adalah kepala sekolah, guru, serta siswa. Dalam proses pelaksanaan kebijakan SSK seluruh sumber daya saling kerja sama dan berkolaborasi dalam melaksanakan program kegiatan

3. Tahap Aplikasi

Pelaksanaan kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Banguntapan dibagi ke dalam tiga kegiatan utama yaitu kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler.

a. Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan utama pembelajaran sekolah yang dilakukan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan atau terjadwal. Dalam implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan, kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 1 Banguntapan adalah mengintegrasikan pendidikan kependudukan dengan mata pelajaran sehari-hari peserta didik. Dalam praktiknya, tidak semua mata pelajaran dapat disisipkan materi kependudukan secara utuh, namun harus disesuaikan dengan kompetensi dasar masing-masing mata pelajaran.

b. Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati mata pelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler yang dilakukan di SMA Negeri 1 Banguntapan untuk menunjang sekolah siaga kependudukan adalah tugas mandiri observasi lapangan mencari informasi data kependudukan di kelurahan dan Kampung KB. Selain kegiatan kokurikuler berupa tugas mandiri observasi lapangan sebagai penunjang sekolah siaga kependudukan, SMA Negeri 1 Banguntapan juga memiliki inovasi yang menjadi ciri khas pelaksanaan kebijakan sekolah siaga kependudukan yaitu inovasi siaran ilmu dan kuis kependudukan setiap pagi hari melalui *sound* dan mikrofon dari sekolah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin setiap pagi yang dilakukan untuk mensosialisasikan ilmu/ wawasan kependudukan kepada seluruh peserta didik.

c. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendamping pelajaran yang diberikan pada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan tambahan di luar jam pembelajaran yang diharapkan dapat membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Di SMA Negeri 1 Banguntapan, kegiatan ekstrakurikuler penunjang sekolah

siaga kependudukan adalah PIK-R dan Organisasi Kependudukan.

Program PIK-R merupakan kegiatan yang dikelola lebih banyak oleh peserta didik. Program kerja yang dibentuk pun berdasarkan musyawarah anggota, guru pembina hanya membimbing dan mengawasi sehingga peserta didik bisa menentukan sendiri apa kegiatan yang nyaman untuk mereka mengembangkan pengetahuan kependudukan. Selain PIK-R, ekstrakurikuler organisasi kependudukan juga memberikan materi-materi kependudukan sesuai kegiatannya. Organisasi ini menjadi wadah utama dalam mengimplementasikan dan menyusun program-program kegiatan sekolah siaga kependudukan.

Implementasi Kebijakan SSK dilihat dari segi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Komponen komunikasi dalam proses implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Banguntapan di bangun oleh 3 hal yaitu penyampaian, kejelasan dan keajegan. Pesan dapat diterima dengan baik apabila penyampaian pesan mudah di mengerti oleh komunikan. Pola komunikasi menggunakan prinsip dua arah dan terbuka supaya siswa lebih nyaman dan berani untuk menyampaikan pendapatnya. Selain itu ditanamkan juga nilai saling menghormati dalam berbicara. Guru-guru terbuka dan sering mengajak siswa berbincang di luar jam pelajaran, hal ini

ditujukan agar bisa lebih dekat dengan siswa dan siswa terdidik untuk berani dalam menyampaikan ide/pendapatnya. Kedua yaitu kejelasan, Kejelasan yang dimaksud dalam aspek ini adalah mengenai kejelasan informasi dalam komunikasi pengimplementasian kebijakan sekolah siaga kependudukan. Komunikasi yang di lakukan oleh para pelaksana kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Banguntapan bersifat terbuka dan dua arah. Komunikasi yang dilakukan dibiasakan menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah di pahami, selain itu juga menerapkan prinsip efektif dan efisien, sehingga pesan yang di sampaikan mudah diterima dan jelas. Ketiga yaitu konsistensi Konsistensi komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan sekolah siaga kependudukan di lihat dari segi kesinambungan bahasan dan informasi yang sedang dibahas. Praktiknya, ketika ada informasi/topik yang sedang di bahas oleh guru dengan siswa maka guru akan melakukan pendampingan supaya siswa tidak bingung. Proses komunikasi ini tidak hanya berhenti ketika selesai jam sekolah, namun masih bisa dilanjutkan ketika di rumah dengan cara melalui media *WhatsApp*. Konsistensi dan kesinambungan dalam membahas topik ini ditujukan agar topik yang di bahas dapat selesai dan matang kesimpulannya. Sehingga untuk mengambil keputusan setelah pembahasan yang berkelanjutan akan lebih tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan

sebuah kebijakan/ program. Tingkat kualitas komponen sumber daya menentukan keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan. sumber daya yang turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah siaga kependudukan yang meliputi, manusia, sumber daya material (fasilitas), dan sumber daya finansial/ anggaran sekolah. Sumber daya manusia terdiri dari kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik dan siswa. Adapun penempatan posisi sumber daya manusia ditempatkan sesuai kompetensinya dalam tim sekolah siaga kependudukan. Selain SDM, pelaksanaan SSK ini didukung oleh sumber daya anggaran dan fasilitas. Anggaran yang di gunakan merupakan anggaran dari internal sekolah, dan untuk fasilitas SMA N 1 Banguntapan memiliki fasilitas utama yaitu pojok kependudukan, ruang podcast, ruang meeting. Seluruh fasilitas ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan sekolah siaga kependudukan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti kecakapan, komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis dalam melaksanakan kebijakan. Berkenaan dengan aspek disposisi Edward III (dalam Hasbullah, 2016 : 99) menyatakan bahwa disposisi merupakan kesediaan implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA Negeri 1 Banguntapan, kebijakan tersebut di respon dan diterima dengan positif oleh warga

sekolah. Respon positif ini di wujudkan dengan dukungan dan komitmen yang baik dalam melaksanakan program kerja. Pemaksimalan potensi dan etos kerja yang tinggi menjadikan pelaksanaan program SSK menjadi maksimal. Selain komitmen, dalam pelaksanaannya di dukung juga oleh motivasi yang tinggi untuk melaksanakan SSK. SSK ini dinilai penting untuk di implementasikan terutama ke kalangan siswa SMA, mereka berpendapat bahwa wawasan dan materi yang ada dalam SSK ini relevan dan baik dalam menunjang terbentuknya generasi yang berkualitas dan berencana, terlebih dapat memperbaiki kualitas bangsa ke depannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimaksud di sini merupakan karakteristik, norma-norma, dan pola- pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Edward III (dalam Hasbullah, 2016 : 99) menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan pendidikan. Struktur birokrasi SSK di SMA N 1 Banguntapan terdiri dari penanggung jawab yang di di amanahkan kepada kepala sekolah, kemudian pembina SSK di amanahkan kepada guru terpilih, dan dibantu oleh ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan tiga divisi pembantu yaitu divisi publikasi, divisi kegiatan dan divisi informasi yang masing-masing posisi di

amanahkan kepada siswa terpilih. Dalam praktiknya struktur birokrasi ini hanya posisi strata dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, seluruh *stake holder* yang terlibat lebih memilih untuk saling bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan kependudukan secara bersama-sama. Siswa berkoordinasi dan berkonsultasi dengan guru pembina, kemudian guru pembina membahas dengan guru yang lain dan kepala sekolah kemudian di sampaikan dan didiskusikan lagi dengan siswa.

Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan sekolah siaga kependudukan di SMA N 1 Banguntapan yaitu adanya dukungan guru dan fasilitas yang mendukung. Dukungan dan komitmen dari guru menjadi komponen besar yang menunjang keberhasilan SSK di SMA N 1 Banguntapan. Dukungan ini diwujudkan dengan etos kerja yang tinggi dan komitmen dalam membina siswa dalam melaksanakan program kerja. Selain itu, adapun fasilitas penunjang yang turut mendorong maksimalnya pelaksanaan kegiatan SSK yaitu pojok kependudukan sebagai fasilitas utama yang di dalamnya terdapat pojok baca, fasilitas buku bacaan, mading dan media edukasi lainnya. selain pojok kependudukan, ada pun fasilitas ruang podcast media dan ruang meeting utama sebagai fasilitas tambahan penunjang kegiatan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sekolah siaga

kependudukan di SMA N 1 Banguntapan yaitu kesulitan dalam mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan pada kompetensi dasar karena materi pada kurikulum sudah terlalu padat dan tidak semua kompetensi dasar bisa di integrasikan langsung dengan materi kependudukan. Kedua kesulitan dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana, hal ini karena untuk melakukan pengadaan biaya yang dikeluarkan cukup mahal dan anggaran sekolah tidak cukup untuk mencukupi seluruh fasilitas lengkapnya. Ketiga keterbatasan anggaran, keterbatasan anggaran ini karena anggaran SSK hanya berasal dari anggaran internal sekolah tanpa ada tambahan dari pemerintah, sehingga dana sekolah yang sudah di plotting untuk kebutuhan sekolah pada umumnya harus dipotong dan dibagi lagi untuk kebutuhan dana kegiatan dan fasilitas SSK juga.

Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Tahap Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA N 1 Banguntapan terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi. Tahap interpretasi terdiri atas kegiatan perumusan SSK dan sosialisasi, tahap pengorganisasian tahap pengaturan pelaksanaan kebijakan, SOP, Sumber daya manusia dan fasilitas, penetapan manajemen dan jadwal kegiatan. Dan tahap aplikasi meliputi kegiatan pengintegrasian wawasan kependudukan ke tiga bidang yaitu intrakulikuler, ekstrakulikuler dan ko kulikuler.

2. Implementasi Kebijakan Sekolah Siaga Kependudukan di SMA N 1 Banguntapan dilihat dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari segi komunikasi proses implementasi kebijakan berjalan lancar, dua arah, dan efektif, kemudian didukung dengan sumber daya yang kompeten, berkomitmen tinggi yang meliputi seluruh warga sekolah, serta memiliki struktur birokrasi yang ringkas dan efisien.
3. Faktor Pendukung dalam implementasi kebijakan SSK di SMA N 1 Banguntapan yaitu dukungan penuh dari guru dan fasilitas yang mendukung, serta faktor penghambat dalam proses implementasi SSK yaitu kendala dalam mengintegrasikan materi kependudukan pada kompetensi dasar, minimnya anggaran, serta mahal biaya pengadaan pelengkapan fasilitas SSK.

Saran

1. Bagi SMA N 1 Banguntapan
Melihat dari kendala yang ada, akan lebih baik jika SMA N 1 Banguntapan melakukan pengembangan program serta inovasi kegiatan dengan mengelaborasi dengan materi yang lebih relevan, kembali mengaktifkan social media untuk kegiatan SSK, mengadakan pembaharuan informasi dalam pojok kependudukan secara berkala serta melakukan monitoring dan evaluasi yang melibatkan alumni.
2. Bagi BKKBN DIY
Perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan kebijakan SSK untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta memberikan

pendampingan berkala kepada SMA N 1 Banguntapan/ sekolah lain supaya lebih maksimal kualitas capaian program kegiatannya.

3. Bagi Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi DIY

Perlu diadakan kegiatan sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah dari SD hingga SMA untuk menebarkan pemahaman mengenai SSK dan materi kependudukan agar bisa diterapkan secara menyeluruh di tingkat pendidikan formal.

Daftar Pustaka

- Abdiyah, A., Hartanti, F. I., & Sulistyorini, Y. (2020). *Implementation Analysis Of Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) In East Java 2019*. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 9(2), 137-145.
- Awwaluddin, A. M., & Sadewo, F. S. (2021). *Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan Talcott Parssons*. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik DanHummanioramaniora*, 5(1), 181-191.
- Aini, S., & Sahono, B. *Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan dalam Pembelajaran*. Aini, S., & Sahono, B. (2019). *Implementation Of School Programs At Population In Learning (Case Study in South Bengkulu 1 High School)*. *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 9(1), 12-21
- Aritonang, W. (2022). *Pengaruh Bonus Demografi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Kajian dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Ansori, M. (2020). Dimensi HAM dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Iaifa Press.
- Aini, S. (2022). Implementasi Program Sekolah Siaga Kependudukan (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan). *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(1), 65-70.
- Bidaya, Z., & Dari, S. M. (2020). Revolusi Mental Melalui Penguatan Pendidikan Karakter untuk Siswa Berkebutuhan Khusus di Kota Mataram. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 51-60.
- Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. *Jurnal Medtek*, 2(1), 1-13. Madjid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan. Samudra Biru.
- Djuanda, I. (2020). Implementasi evaluasi program pendidikan karakter model cipp (context, input, process dan output). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 3(01), 37-53.
- Fajri, W. A., Sugiyono, S., & Burhanudin, A. (2020). Identifikasi Kesiapan Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan di Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Pringkuku. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 12(1), 12-19.
- Hermawan, I. (2019). Analisis Pengaruh Bonus Demografi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 32-48.
- Indraswari, R. R., & Yuhan, R. J. (2017). Jurnal Kependudukan Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol, 12(1)*, 1-12.
- Kartikasari, Y., & Hidayah, N. (2021). Implementasi Program Siaga Kependudukan Pada SMAN 1 Ngaglik Sleman. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10(2), 174-190.
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030: Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 3(I), 45-69.
- Lubis, B., & Mulianingsih, S. (2019). Keterkaitan bonus demografi dengan teori generasi. *Jurnal Registratie*, 21-36.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 3(2), 9-19.
- Waruwu, K. J. I. M. (2022). Bonus Demografi Dalam Aspek Keluarga Berencana (KB) Peluang dan Tantangan Kota Salatiga (*Doctoral dissertation*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora).
- Widyanto, A. (2023). Konseptualisasi Integrasi Materi Kependudukan dalam Pendidikan Agama Islam Melalui Program Sekolah Siaga Kependudukan di Indonesia.